

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR HAMKA

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI
UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA BAGI HASIL
TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL PADA
KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

Dody Saputra

1202025053

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JAKARTA
2017



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR HAMKA

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI
UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA BAGI HASIL
TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL PADA
KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

Dody Saputra

1202025053

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JAKARTA
2017

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN”** merupakan hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagian bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA atau perguruan tinggi lainnya. Semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia bertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Jakarta, 26 Agustus 2017
Yang Menyatakan,



METERAI
EMPTEL
TGL. 27
63A4BAEF681305557
6000
ENAM RIBU RUPIAH

(Dody Saputra)

NIM 1202025053

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

JUDUL : **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

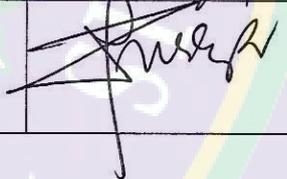
NAMA : **DODY SAPUTRA**

NIM : **1202025053**

PROGRAM STUDI : **AKUNTANSI**

TAHUN AKADEMIK : **2017**

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan dalam ujian skripsi :

Pembimbing I	Dr. Nuzulul Hidayati, S.E., M.M., Ak., C.A.	
Pembimbing II	M. Nurrasyidin, S.E., M.Si	

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA



Daran Heriansyah, S.E., M.Si

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul :

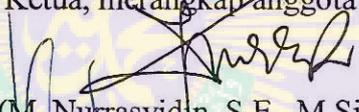
**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP
PENGALOKASIAN BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Yang disusun oleh :
Dody Saputra
1202025053

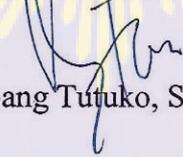
Telah diperiksa dan dipertahankan di depan panitia ujian kesarjanaan strata-satu
(S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA
Pada tanggal : 26 Agustus 2017

Tim Penguji :

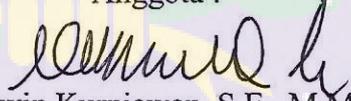
Ketua, merangkap anggota :


(M. Nurrasyidin, S.E., M.Si.)

Sekretaris, merangkap anggota :

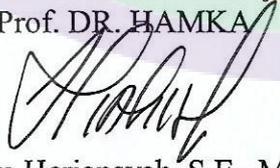

(Bambang Tutuko, S.E., M.Si., Ak., C.A.)

Anggota :


(Herwin Kurniawan, S.E., M.M.)

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA


Daram Heriansyah, S.E., M.Si

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA




Nuryadi Wijiharjono, S.E., M.M

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dody Saputra
NPM : 1202025053
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :
“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA berhak menyimpan, mengalih mediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Agustus 2017
Yang Menyatakan,

(Dody Saputra)

ABSTRAKSI

Dody Saputra (1202025053)

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP
PENGALOKASIAN BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

*Skripsi. Program Strata Satu Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 2017. Jakarta.*

*Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus,
Dana Bagi Hasil, Belanja Modal.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap pengalokasian belanja modal.

Variabel yang diteliti adalah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil sebagai variabel independen dan pengalokasian belanja modal sebagai variabel dependen. Sampel yang digunakan adalah menggunakan teknik judgment sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, populasi dijadikan sampel yaitu 14 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Data penelitian bersifat sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi APBD dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Hasil penelitian menggunakan SPSS Versi 21.0 dengan persamaan regresi linier berganda $BM = -57.700 + 0,005 PAD + 0,413 DAU + 0,638 DAU + 0,457 DBH$ yang telah diuji kelayakan asumsi normalitas, heterokedastisitas, multikolinearitas dan autokorelasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengalokasian belanja modal dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,042 < 1,994$) dan tingkat

signifikansi 0,966. Variabel dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian belanja modal dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,159 > 1,994$) dan tingkat signifikansi 0,000. Variabel dana alokasi khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengalokasian belanja modal dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,371 < 1,994$) dengan nilai signifikansi 0,175. Kemudian variabel dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian belanja modal dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($19,589 > 1,994$) dengan nilai signifikansi 0,000. Hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan (bersama-sama) keempat variabel independen tersebut yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal dengan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($121,384 > 2,50$) dan tingkat signifikansi sebesar 0,000.

Berdasarkan hasil total Adjusted R Square menunjukkan bahwa pengaruh antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap pengalokasian belanja modal, yaitu sebesar adalah 87,5% dan sisanya sebesar 12,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam variabel ini seperti transfer pemerintah pusat lainnya, transfer pemerintah provinsi, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dari hasil penelitian ini disarankan kepada pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan menggali potensi pendapatan asli daerah sehingga pemerintah tidak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

ABSTRACT

Dody Saputra (1202025053)

THE EFFECT OF REGIONAL OWN REVENUE, GENERAL ALLOCATION FUND, SPECIAL ALLOCATION FUND, AND REVENUE SHARE FUND TO CAPITAL EXPENDITURE AREA DISTRICT / CITY OF SOUTH SUMATRA

The Thesis of Bachelor Degree Program. Departement of Accounting. Economic and Business Faculty Of Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA University. 2017. Jakarta.

Keywords : Regional Own Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Share Fund, Capital Expenditure.

The study aims to determine how the influence of regional own revenues, general allocation funds, a special allocation fund, and revenue sharing funds to the allocation of capital expenditure.

The variables researched are the regional own revenue, general allocation fund, a special allocation fund, and revenue share fund as an independent variable and the allocation of capital expenditures as the dependent variable. The sample used is judgement sampling technique that is sample determination technique with certain consideration. The population is sampled namely 14 regency/cities in South Sumatra Province. Research data is secondary obtained from the realization of APBD report from the financial checking agency of the Republic of Indonesia (BPK-RI).

The result use SPSS version 21.0 with multiple linear regression equation $BM = -57.700 + 0,005 PAD + 0,413 DAU + 0,638 DAU + 0,457 DBH$ which have been tested the easibility of assumptions of normality, heteroscedaticity, multicollinearity and autocorrelation. The test result indicate that the variable of regional own revenue of the region have a positive and no significant impact on the

allocation of capital expenditure with the value $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,042 < 1,994$) and the level of significance 0.966. The variable general allocation fund has a positive and significant impact on the allocation of capital expenditure with the value $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,159 > 1,994$) and the level of significance 0.000. The variable special allocation funds has a positive and no significant impact on the capital expenditure allocation with value $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,371 < 1,994$) with significance value 0.175. Then the variable of revenue share fund influences the allocation of capital expenditure with value $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($19,589 > 1,994$) with significance 0.000. F test result shows that simultaneously (together) the four independent variables are regional own revenue, general allocation funds, special allocation fund and revenue share funds have a significant effect on the value $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($121,384 > 2,50$) and the level of significance of 0.000.

Based on the result of total Adjusted R Square shows that the influence of regional own revenue, general allocation fund, special allocation fund, and revenue share fund on capital expenditure allocation is 87,5% and the rest equal to 12,5% explained by other variable not included in these variables are like other central government transfers, Provincial government transfers, and other legitimate local revenue.

From the result of this study suggested to the local government to further improve the regional financial independent by exploring the potential of local revenue so that the government does not depend on the transfer of fund from the central government.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan”**. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju alam pencerahan. Serta ucapan terima kasih kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta yang selalu sabar dan perhatian. Skripsi ini penulis dedikasikan untuk kedua orang tua, terima kasih atas kasih sayang, motivasi, nasihat dan dukungannya baik moril maupun materil serta do'a yang tidak henti-hentinya dipanjatkan hingga selesai dalam menempuh gelar Sarjana Ekonomi.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis memperoleh bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Suyatno, M. Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
2. Bapak Nuryadi Wijiharjono, S.E., M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. Bapak Zulpahmi, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
4. Bapak Dr. Sunarta, S.E., M.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
5. Bapak Tohirin, S.H.I., M.Pd.i., selaku Wakil Dekan III dan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

6. Bapak Daram Heriansyah, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
7. Ibu Dr. Nuzulul Hidayati selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan serta saran-saran dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak M. Nurrasyidin, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan serta saran-saran dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Dosen-dosen yang telah memberi bekal ilmu yang berguna selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
10. Sahabat seperjuangan yang selalu ada dalam suka maupun duka Rizki Domaputra, Nur Muhammad Majid Usrial, Muchamad Firman Syah, dan Sandi Widodo yang selalu hadir memberikan dukungan, motivasi, serta do'a yang selalu dipanjatkan untuk penulis.
11. Sahabat CM (Dodi. A, Maday, Afif, Erwin, Fini, Fita, Errica, Bunaiya) yang selalu memberikan motivasi, dukungan, serta do'a yang selalu dipanjatkan untuk penulis.
12. Teman seperjuangan Akuntansi A tahun 2012 yang telah membantu penulis, memberikan dukungan, dan motivasi sehingga terselesainya skripsi ini.
13. Keluarga Besar PK IMM FEB UHAMKA JAKSEL dan PC IMM JAKSEL yang telah membantu penulis, memberikan dukungan, dan motivasi sehingga terselesainya skripsi ini.
14. Keluarga Besar KM FEB UHAMKA (HIMA Akuntansi 2013-2014 dan BEM FEB UHAMKA 2014-2015) yang telah membantu penulis, memberikan dukungan, dan motivasi sehingga terselesainya skripsi ini.
15. Keluarga Besar BEM UHAMKA 2015-2016 yang telah membantu penulis, memberikan dukungan, dan motivasi sehingga terselesainya skripsi ini.
16. Semua teman-teman Program Studi Akuntansi dan Manajemen yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih untuk dukungannya.

17. Seluruh staf bagian akademik dan kemahasiswaan serta seluruh karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Semoga semua kebaikan yang telah kalian berikan dibalas oleh Allah SWT.

Akhir kata, peneliti mohon maaf jika dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kesalahan yang tidak disadari. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi semua pihak.

Billahi fii sabiililhaq Fastabiqul Khairat

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 17 Agustus 2017

Penulis

(Dody Saputra)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	7
1.2.1 Identifikasi Masalah	7
1.2.2 Pembatasan Masalah	8
1.2.3 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Gambaran Penelitian Terdahulu	11
2.2 Telaah Pustaka	37
2.2.1 Akuntansi	37
2.2.2 Akuntansi Sektor Publik	38
2.2.2.1 Definisi Akuntansi Sektor Publik	38
2.2.2.2 Elemen-elemen Akuntansi Sektor Publik	38

2.2.3 Akuntansi Keuangan Daerah.....	40
2.2.4 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).....	41
2.2.5 Pendapatan Asli Daerah	42
2.2.5.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah.....	42
2.2.5.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah	43
2.2.6 Dana Alokasi Umum.....	47
2.2.6.1 Definisi Dana Alokasi Umum	47
2.2.6.2 Tahap Perhitungan Dana Alokasi Umum	48
2.2.6.3 Proporsi Pembagian Dana Alokasi Umum	49
2.2.7 Dana Alokasi Khusus.....	50
2.2.7.1 Definisi Dana Alokasi Khusus	50
2.2.7.2 Kriteria Dana Alokasi Khusus.....	50
2.2.8 Dana Bagi Hasil	51
2.2.8.1 Definisi Dana Bagi Hasil	51
2.2.8.2 Sumber-sumber Dana Bagi Hasil.....	52
2.2.9 Belanja Modal	54
2.2.9.1 Definisi Belanja Modal.....	54
2.2.9.2 Kategori Belanja Modal	55
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis.....	56
2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pengalokasian Belanja Modal.....	56
2.3.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal	57
2.3.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal.....	58
2.3.4 Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal.....	59
2.4 Rumusan Hipotesis	61
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian	62
3.2 Operasionalisasi Variabel	62
3.3 Populasi dan Sampel	65
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	68

3.4.1	<i>Tempat dan Waktu Penelitian</i>	68
3.4.2	<i>Teknik Pengumpulan Data</i>	69
3.5	Teknik Pengolahan dan Analisis Data	69
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	76
4.1.1	<i>Lokasi Penelitian</i>	78
4.1.2	<i>Sejarah Singkat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)</i>	78
4.1.3	<i>Sejarah Singkat Kabupaten/Kota</i>	79
4.2	Hasil Pengolahan Data dan Pembahasan	83
4.2.1	<i>Penyajian Data</i>	83
4.2.1.1	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>	83
4.2.1.2	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>	93
4.2.1.3	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK)</i>	101
4.2.1.4	<i>Dana Bagi hasil (DBH)</i>	111
4.2.1.5	<i>Belanja Modal</i>	120
4.2.2	<i>Analisis Akuntansi</i>	130
4.2.2.1	<i>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal</i>	131
4.2.2.2	<i>Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal</i>	135
4.2.2.3	<i>Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal</i>	139
4.2.2.4	<i>Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal</i>	143
4.2.2.5	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal</i>	147
4.2.3	<i>Analisis Statistik</i>	152
4.2.3.1	<i>Analisis Statistik Deskriptif</i>	152
4.2.3.2	<i>Analisis Regresi Linier Berganda</i>	154
4.2.3.3	<i>Uji Asumsi Klasik</i>	156
4.2.3.4	<i>Uji Hipotesis</i>	163
4.2.3.5	<i>Analisis Koefisien Determinasi (R^2)</i>	166
4.3	Interpretasi Hasil Penelitian	167

BAB V PENUTUP

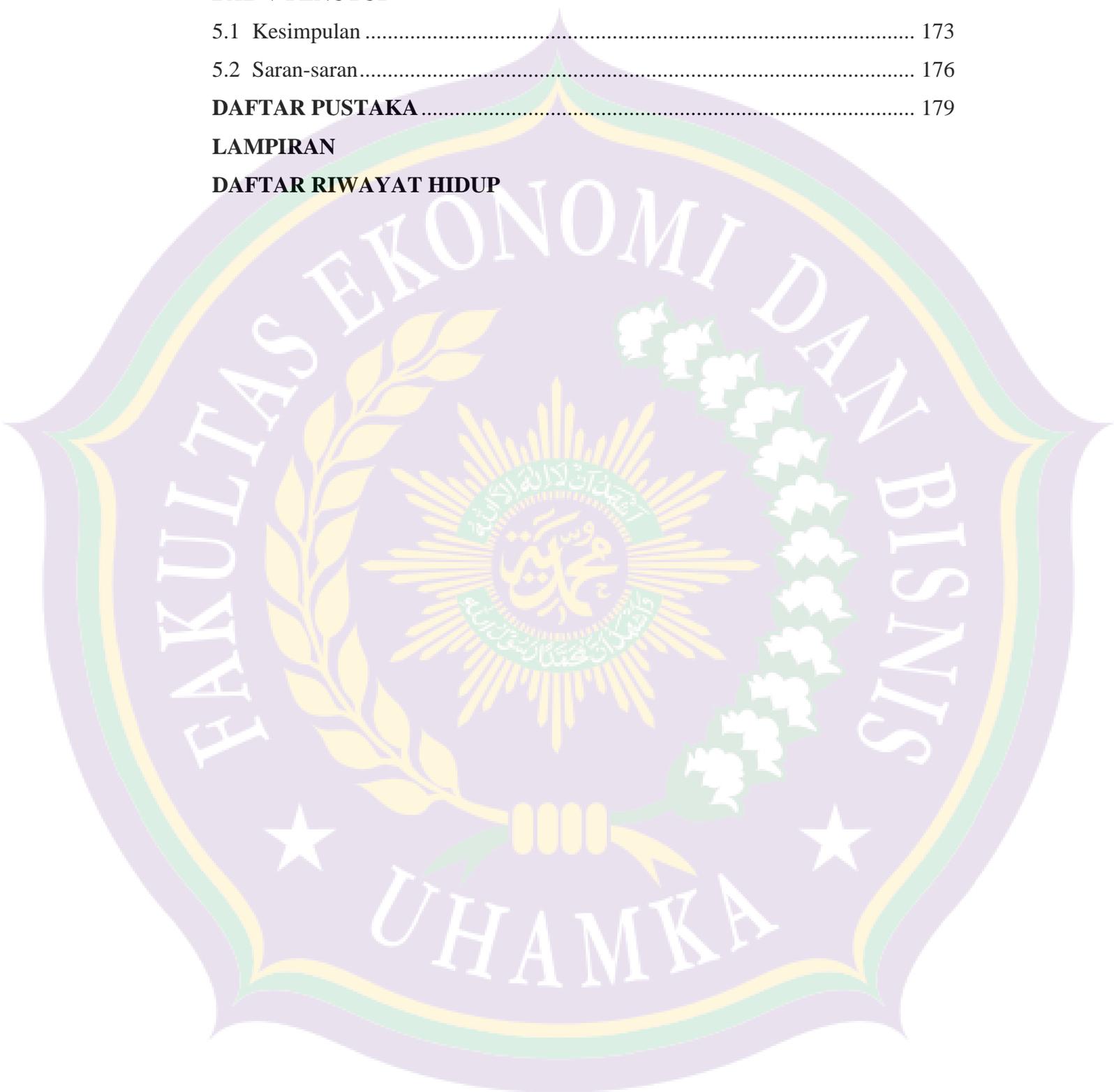
5.1 Kesimpulan 173

5.2 Saran-saran..... 176

DAFTAR PUSTAKA 179

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1	Total Penerimaan PAD, DAU, DAK, DBH, dan Belanja Modal Provinsi Sumatera Selatan.....	4
2	Ringkasan Penelitian Terdahulu	27
3	Operasional Variabel	63
4	Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan	66
5	Pemilihan Sampel Penelitian	67
6	Sampel Penelitian	68
7	Kriteria Pengujian Autokorelasi	73
8	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	83
9	Dana Alokasi Umum (DAU)	83
10	Dana Alokasi Khusus (DAK)	102
11	Dana Bagi Hasil (DBH)	112
12	Belanja Modal	120
13	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal	131
14	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal	135
15	Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal	139
16	Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal	143
17	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal	148
18	Hasil Analisis Deskriptif	153
19	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	155
20	Hasil Uji Normalitas	155
21	Hasil Uji Multikolinieritas	159
22	Hasil Uji Autokorelasi	161
23	Hasil Uji <i>Run Test</i>	161
24	Hasil Uji Statistik t	164
25	Hasil Uji F	166
26	Hasil Uji Koefisien Determinasi	167



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1	Skema Kerangka Pemikiran Teoritis	60
2	Grafik <i>Normal P-plot of Regression Standardized Residual</i>	157
3	Grafik <i>Scatterplot</i>	160
4	Daerah Pengujian <i>Durbin Watson</i>	161

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1	Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Sumatera Selatan 2011-2010 ..	1/19
2	Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Sumatera Selatan 2013-2012 ..	3/19
3	Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Sumatera Selatan 2015-2014 ..	5/19
4	Hasil Uji SPSS Versi 21.0	7/19
5	Formulir Permohonan Informasi Publik	13/19
6	Tanda Terima Penyerahan Dokumen Informasi Publik	14/19
7	Formulir Pengajuan Judul Proposal Skripsi	15/19
8	Formulir Pengajuan Persetujuan Judul Proposal Skripsi	16/19
9	Surat Tugas	17/19
10	Catatan Konsultasi Skripsi Pembimbing I	18/19
11	Catatan Konsultasi Skripsi Pembimbing II	19/19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan daerah di Indonesia semakin pesat, seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kebijakan otonomi daerah ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah, yang sekarang telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 pasal 6 ayat 2 huruf C tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara diserahkan kepada Gubernur /Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Demikian pula untuk mencapai kestabilan nilai rupiah tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dilakukan oleh bank sentral. Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sedangkan

pada ayat 2 menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Undang-Undang tersebut memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 157 menyatakan bahwa salah satu pendapatan daerah adalah Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH dibagi menjadi 2 yaitu DBH pajak dan bukan pajak/sumber daya.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif (Yovita 2011).

Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah. Untuk mengembangkan potensi

daerah tersebut maka pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran belanja modal, Sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja modal tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Otonomi daerah menempatkan Pemerintah Daerah (pemda) sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab besar dalam upaya pencapaian tujuan bernegara. Salah satu instrumen sekaligus faktor penting bagi keberhasilan pembangunan daerah adalah manajemen belanja daerah, yang tercermin melalui APBD (Suara Merdeka 2012).

Pemerintah Daerah yang berhasil menjalankan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan mengelola APBD secara efektif dan efisien. Sebaliknya, pengelolaan APBD yang buruk dapat menghambat kinerja pemda dalam peningkatan pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Persoalan yang muncul adalah saat pemda dihadapkan pada jumlah belanja daerah yang kecil tetapi harus menanggung kebutuhan besar.

Belanja daerah yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung (Permendagri nomor 25 tahun 2009), merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, di mana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan otonomi daerah. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok

belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender. Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Erlina, Omar, dan Rasdianto, 2015 : 116). Berikut ini total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan (DAU, DAK, dan DBH), dan Belanja Modal Provinsi Sumatera Selatan tahun 2011-2015 yang diperoleh dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) :

Tabel 1
Total Penerimaan PAD, DAU, DAK, DBH, dan Belanja Modal
Provinsi Sumatera Selatan
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	PAD	Rasio (%)	DAU	DAK	DBH	Belanja Modal
2011	1.849.119,91	34,98	646.813,30	32.287,00	1.313.456,70	1.139.120,16
2012	2.001.714,58	8,25	716.153,26	45.401,43	1.617.243,96	1.017.181,54
2013	2.021.696,78	0,99	870.516,77	25.188,40	1.753.511,29	862.903,67
2014	2.422.673,79	19,83	985.542,76	62.754,90	1.934.568,34	733.382,31
2015	2.534.526,41	4,62	931.915,47	69.405,32	2.207.759,13	1.041.021,93

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI, diolah oleh penulis, 2017.

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa PAD adalah sumber pendapatan terbesar di Provinsi Sumatera Selatan. Sejak tahun 2011 hingga 2015 PAD terus mengalami peningkatan. Kabid Perekonomian BAPPEDA mengatakan bahwa sejak tahun 2008 sampai 2015 PAD terus meningkat karena pemanfaatan potensi yang ada, potensi tersebut yaitu Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, selain itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) juga melakukan kerja sama dengan berbagai perusahaan untuk menggali potensi SDA yang cukup besar. Hal ini karna Gubernur Alex Noerdin cukup konsisten dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga sumber daya yang ada terus dimaksimalkan (antarasumsel.com 2013). Namun hal tersebut dianggap masih belum puas dirasakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan karena hanya terealisasi 88,25% atau Rp 2.534.526.413.315,20 dari tahun anggaran 2015 yaitu sebesar Rp 2.871.976.896.280,09. Pemprov Sumatera Selatan, dituntut terus menggenjot potensi PAD. Mukti Sulaiman (Sekda Provinsi Sumatera Selatan) memberikan keterangan bahwa tidak tercapainya target tersebut lantaran melemahnya ekonomi. Kemudian, harga minyak dunia turun, komoditi di Sumatera Selatan seperti karet dan sawit masih melemah. “kalau dua komoditas ini naik, maka akan naik pula PAD kita” (sumeks.co.id 2015). Hasil penelitian Wimpi Priambudi (2016) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berbeda dengan hasil penelitian Arbie Gugus Wandira (2013) yang menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dikarenakan ada nilai PAD yang rentangnya sangat jauh. Daerah dengan PAD rendah kemungkinan dikarenakan kurangnya penggalian sumber-sumber penerimaan baru

(ekstensifikasi), seharusnya setiap daerah meningkatkan PAD melalui upaya ekstensifikasi yaitu dengan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, upaya ini harus diarahkan dengan mempertahankan dan menggali potensi daerah agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Dana alokasi umum adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan (Sonny Sumarsono, 2010 : 90). Luh Putu Rani Mayasari (2014) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Berbeda dengan hasil penelitian Fitria Megawati Sularno (2013) menyatakan bahwa DAU tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa DAU yang selama ini diterima daerah tidak digunakan untuk pembangunan daerah yang terlihat dalam alokasi belanja modal.

Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah (Mahsun, Firman Andre, 2013 : 70). Sheila Ardhian Nuarisa (2013) menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Berbeda dengan hasil penelitian Hustianto Sudarwadi (2015) menyatakan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal karena penentuan jumlah DAK sangat tergantung jumlah dana yang tersedia di dalam APBN. Tiap tahunnya DAK diberikan tidak sama artinya DAK hanya diberikan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus atau masalah-masalah

khusus yang dihadapi suatu daerah yang menjadi urusan daerah tersebut.

Dana bagi hasil merupakan bagian daerah dari penerimaan pajak penghasilan perseorangan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan penerimaan dari Sumber Daya Alam (Rahardjo Adisasmita, 2011 : 4). Bayu Samodra (2016) menyatakan bahwa DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Berbeda dengan hasil penelitian Reuty Fajar Aqnisa (2016) yang menyatakan bahwa DBH tidak berpengaruh terhadap belanja modal karena penerimaan dana bagi hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam) sebesar 10,5% rendah dari dana bagi hasil pajak, sehingga anggaran dana bagi hasil belum dapat memberikan pelayanan publik yang direalisasikan melalui belanja modal. Dana alokasi khusus secara absolut nilainya relatif kecil dan hanya digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas dan menjadi urusan daerah.

Berdasarkan uraian di atas sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan penulis, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang suatu masalah penelitian diidentifikasi yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal?
4. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal?
5. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal?

1.2.2 Pembatasan masalah

Agar terciptanya tujuan penelitian yang terarah, maka penulis berusaha membatasi masalah atau ruang lingkup penelitian yaitu hanya pada pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan belanja modal dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) untuk data Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2011-2015.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas oleh penulis pada penelitian ini adalah “Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dapat mempengaruhi Pengalokasian Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Belanja Modal.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Belanja Modal.
4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Pengalokasian Belanja Modal.
5. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Pengalokasian Belanja Modal.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian merupakan suatu yang sangat berharga untuk mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh penulis selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dan juga dapat memberikan manfaat berbagai pihak antara lain :

1. Bagi Pemerintah Daerah

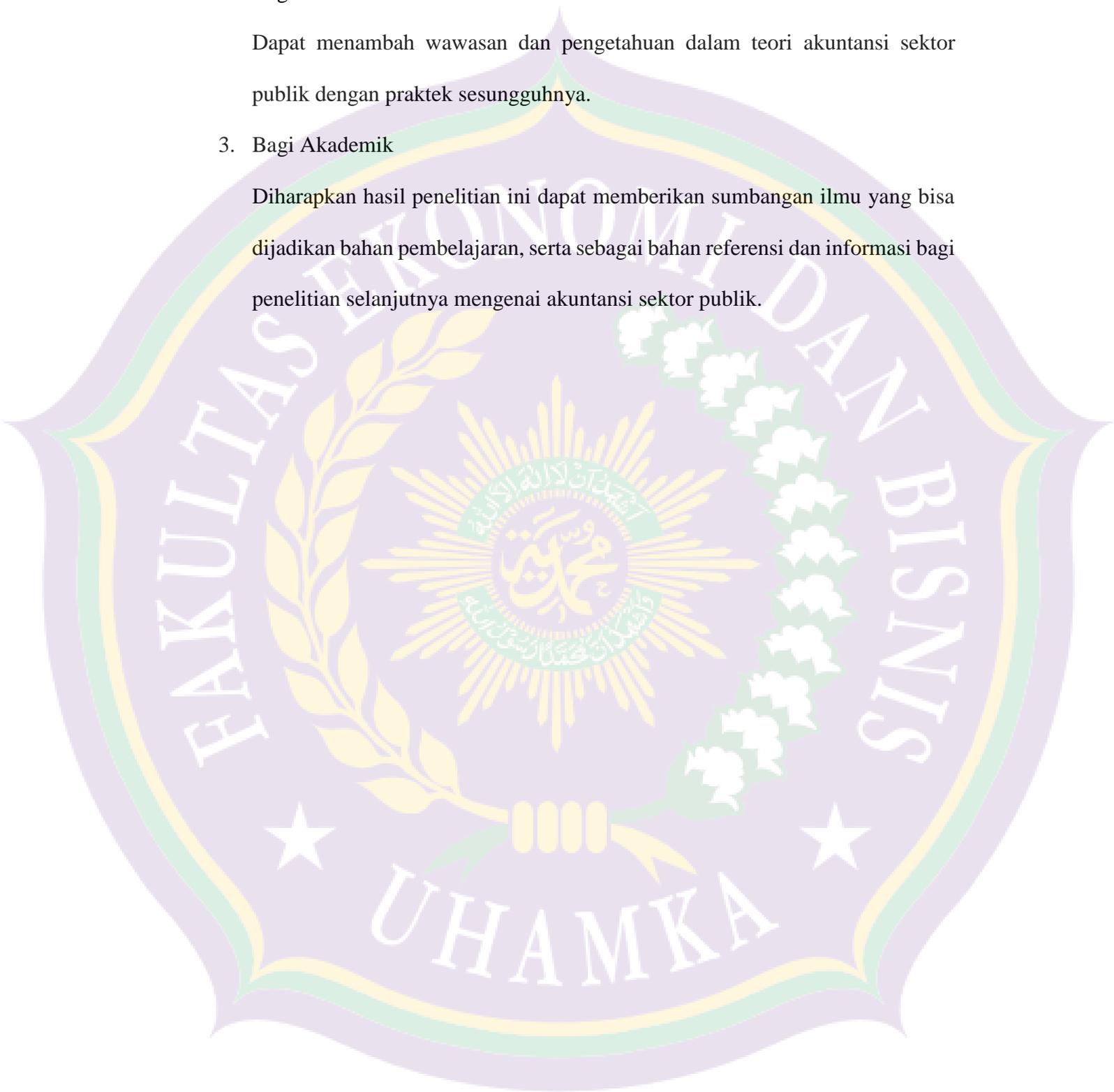
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah.

2. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam teori akuntansi sektor publik dengan praktek sesungguhnya.

3. Bagi Akademik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu yang bisa dijadikan bahan pembelajaran, serta sebagai bahan referensi dan informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai akuntansi sektor publik.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf. (2014). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta : Kencana.
- Abdul Halim dan Syam Kusufi. (2012). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi 4). Jakarta : Salemba Empat.
- _____. (2012). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- _____. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik* (Edisi Kedua). Jakarta : Salemba Empat.
- Arbie Gugus Wandira. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia)*. Skripsi. Semarang : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Arvate dan Enlinson Mattos. (2015). Intergovernmental Transfers and Public Spending in Brazilian Municipalities. "*International Journal of Local Governance*". Volume 23 Nomor 11 Hal. 77-98 Juli 2015. Brazil : Program Studi Pemerintahan Fakultas Administrasi Umum Universitas Sao Paulo.
- Bayu Samodra. (2016). *Faktor-faktor yang mempengaruhi Alokasi Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014*. Naskah Publikasi. Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Gujarati Damodar N. (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika* (Buku 2 Edisi Kelima). Jakarta : Salemba Empat.
- Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti. (2010). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi 2). Jakarta : Salemba Empat.
- Duan dan Jing Vivian Zhan. (2012). Fiscal Transfer and Local Public Expenditure in China A Cross-County Study of Shanxi Province. "*International Journal of Public Administration*". 27, 577-596.
- Duwi Priyatno. (2013). *Mandiri Belajar Analisis Statistik Data dengan SPSS*. Yogyakarta : Mediakom.

Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Erlina, Omar Sakti Rambe, dan Rasdianto. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013*. Jakarta : Salemba Empat.

Firnandi Heliyanto dan Nur Handayani. (2016). “*Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur*”. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* ISSN 2460-0585 Maret 2016 Volume 5, Nomor 3. Surabaya : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.

Fitria Megawati Sularno. (2013). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Skripsi. Bandung : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

Hustianto Sudarwadi. (2015). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat*. “*Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*” ISBN 978-602-17129-5-5. Papua Barat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Papua.

Imam Ghozali. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19* (Edisi Kelima). Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Indra Bastian. (2010). *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga.

Luh Putu Rani Mayasari. (2014). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng*. Skripsi. Bali : Universitas Pendidikan Ganesha.

Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Erlangga.

Mardiasmo. (2011). *Otonomi dan Manajemen keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.

Mohamad Mahsun, Firman Sulistiyowati, dan Andre Purwanugraha. (2013). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Ketiga). Yogyakarta : BPFE.

Muindro Renyowijoyo. (2013). *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba* (Edisi 3). Jakarta : Mitra Wacana Media.

Pungky Ardhani. (2011). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Skripsi. Semarang : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Rahardjo Adisasmita. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Rahman. (2013). *Pengantar Akuntansi 1 : Pendekatan Siklus Akuntansi*. Jakarta : Erlangga.

Rambat Lupiyoadi dan Ridho Bramulya Ikhsan. (2015). *Praktikum Metode Riset Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*.

_____. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.

_____. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah*.

_____. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.

_____. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

_____. (2009). *Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010*.

_____. (2009). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010*.

_____. (2009). *Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia*.

_____. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

- Reuty Fajar Aqnisa. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Provinsi Jawa Tengah. "Publikasi Ilmiah". Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rudianto. (2012). *Pengantar Akuntansi : Konsep & Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Jakarta : Erlangga.
- Sheila Ardhian Nuarisa. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Skripsi. Semarang : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Soleh Chabib dan Heru Rochmansjah. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung : Fokus Media.
- Sonny Sumarsono. (2010). *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Subramanyam dan John J. Wild. (2010). *Analisis laporan Keuangan : Buku Satu*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung : Alfabeta.
- _____. (2014). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Susi Susanti dan Heru Fahlevi. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh). "Jurnal Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)" ISSN 1978-1520 Hal. 183-191. Vol. 1 No. 1. Aceh : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala
- Tim Penyusun. (2014). *Pedoman Penyusunan Skripsi (Edisi Revisi)*. Jakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Tulis S. Meliata, Timbul Sinaga, dan Sylvia Kumala Dewi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi 3)*. Jakarta : Semesta Media.
- Walter T. Harrison Jr., Charles T. Horngren, C. William Thomas, dan Themis Suwardy. (2012). *Akuntansi Keuangan : International Financial Reporting Standards*. Jakarta : Erlangga.

Wimpi Priambudi. (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013*. Skripsi. Yogyakarta : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Younguck dan Dhani Setyawan. (2010). Intergovernmental Transfer and The Flypaper Effect (Evidence from Municipalities/Regencies in Indonesia. "International Journal of Economics". 14 Mei 2010 Vol. 12 Hal. 57-90. Korea. Program Studi Kebijakan Publik dan Manajemen Institute Pembangunan Korea.

Yovita Farah Marta. (2011). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008 – 2010*. Skripsi. Semarang: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

<http://www.suaramerdeka.com>. Diakses pada 20 November 2012. Pukul 16.25.

<http://www.antarasumsel.com>. Diakses pada 31 Mei 2013. Pukul 10.15.

<http://www.sumeks.co.id>. Diakses pada 13 Oktober 2015. Pukul 11.14.